

Catatan Gagasan tentang Kompetensi Profesi “sustainability and resilience” dengan Sertifikasi Internasional

Khusus untuk diskusi internal terbatas, tidak untuk disirkulasikan atau dikutip.

Oleh: Kemal Taruc

LATAR BELAKANG

Posisi pekerjaan saya pada saat itu selaku Habitat Programme Manager for Indonesia maupun sebelumnya sewaktu saya mendampingi Suharso Monoarfa sebagai Menpera yang saat itu menyelenggarakan pertemuan Asia Pacific Ministerial Conference on Housing and Urban Development (APMCHUD) ketiga di Solo tahun 2010 dimana Indonesia menjadi ketua Working Group tentang perubahan iklim dan penanggulangan bencana yang dilanjutkan dan dikukuhkan kembali di pertemuan APMCHUD terakhir di Seoul bulan Nopember 2014 bulan lalu, dimana Indonesia mengetuai Working Group *“Urban Development with a focus on Natural and Climate Change related Disasters with a sub-theme of Urban Development for Equal Opportunity Responding to Natural and Climate Change related Disasters”* – kesemuanya memberikan pemahaman kepada saya bahwa isyu penanggulangan bencana merupakan agenda nasional dan internasional yang Indonesia telah diakui dan diberikan peran penting. Namun sayangnya sampai terakhir saya pensiun sebagai staf PBB bulan Juni yang lalu, belum ada langkah kongkrit dari Indonesia untuk mengisi peran ini.

Pada bulan November 2013 saya diundang sebagai alumni pada pertemuan dengan tim professor Rutgers University¹ yang mendapatkan dana dari Presiden Obama untuk membuka kerjasama di lima negara (Indonesia, China, India, Brazil, dan Korea Selatan), yang saya follow up dengan menghadirkan mereka dalam kunjungan kedua bulan Maret 2014 membawakan topik “green building” dan “disaster resilience” berdasarkan keunggulan Rutgers dalam bidang ini dan kebetulan dua topik yang saya anggap relevan untuk Indonesia saat ini maupun ke depan. Informasi lengkap dapat dilihat pada situs mereka: dan <http://rcgb.rutgers.edu/> Dengan alasan itulah maka saya minta Rutgers datang untuk membagi pengalaman dan membuka kerjasama dalam dua bidang ini, dan dalam bulan saat itu Rutgers mengirimkan Executive Director of the Rutgers Center for Green Building, Jennifer Senick, memberikan kuliah umum tentang dua topik tersebut di depan Dirjen dan staf Direktorat Jenderal Cipta Karya, dan juga di Universitas Tarumanagara².

¹ Juga dihadiri oleh kawan kita Sapta TI-73 alumni Rutgers kelompok Migas bidang HRD.

² Saya telah beberapa kali kontak dengan sdr. Johnny Patta (PL-76) yang menyelesaikan PhD-nya di Rutgers dan menjadi dosen di ITB, namun karena berbagai kesibukannya tak dapat hadir dalam pertemuan dengan Rutgers and Dubes AS sehingga hingga sekarang ITB belum dapat membuka kerjasama yang lebih kongkrit, meskipun Rutgers telah mengunjungi kampus ITB (selain juga ke UNPAD, UGM, UI, dan Unair).

Hubungan ini saya lanjutkan dalam kesempatan saya mengunjungi kampus Rutgers di New Jersey dua kali dalam bulan September-Okttober untuk mematangkan kemungkinan kerjasama lebih kongkrit dalam persiapan kunjungan mereka ke Indonesia tahun depan (antara bulan Maret-Mei 2015).³

TENTANG RESILIENCE DAN SUSTAINABILITY

Pengalaman Rutgers yang menarik selaku universitas negeri di negara bagian New Jersey adalah pada pasca bencana topan Sandy yang melanda dan melumpuhkan kota New York dan pantai timur New Jersey pada tahun 2012. Setahun sesudahnya dengan dana federal dan negara bagian Rutgers diminta mengembangkan sebuah sistem jejaring yang diberi nama New Jersey Resilience Network (informasi lebih detail dapat dipelajari di situsnya <http://www.njresiliency.com/about/>). Untuk itu maka bagi setiap munisipal *city/county* kemudian diberikan pelatihan tentang bagaimana menyiapkan diri dalam keadaan bencana (dan bagaimana bekerja dalam jejaring tersebut) yang kemudian setiap munisipal *city/county* yang telah dilatih dan disiapkan sistemnya lalu diberikan semacam “rating” yang dikaitkan dengan insentif diberikannya dana hibah dari negara bagian atau federal, dan juga akan menjadi rujukan bagi investor yang akan membangun di *city/county* tersebut (dapat lihat di situsnya <http://www.sustainablejersey.com/>).

Pendekatan yang dilakukan adalah menggabungkan dua konsep “sustainability” dan “resilience” sebagai dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Konsep “green design” bukan hanya dilihat dari aspek “kehijauan”-nya namun juga terkait dengan kemampuan untuk menghadapi bencana. Selama ini disain hijau adalah untuk mengurangi dampak terhadap lingkungan, namun disain ini tidak menyiapkan dirinya saat terkena dampak oleh lingkungan (dalam bencana alam). Dikatakan:

***Municipal resilience** is the ability of a community to adapt and thrive in the face of extreme events and stresses. Municipal resilience is achieved by anticipating risk, planning to limit impacts, and implementing adaptation strategies that integrate all community systems – civic, environmental, social and economic – to support recovery and growth.*
(<http://www.njresiliency.com/about/resilience-cycle/>)⁴

Bahkan secara lebih ekstrim dalam artikel di New York Times dikomentari, “*forget about sustainability, it’s about resilience*”:

“...Lower Manhattan contained the largest collection of LEED-certified, green buildings in the world,” he said, referring to a rating program for eco-friendly design. ‘But that was answering only part of problem. The buildings were designed to generate lower environmental impacts, but not to respond to the impacts of the environment’ ... ”⁵

³ Pihak Tarumanagara lalu juga mengirimkan ketua program S2, Dr-Ing. Jo Santoso untuk melanjutkan kerjasama dalam pendirian semacam “sustainable development center” terkait dengan “green design.”

⁴ Juga di New York: <http://www.nyc.gov/html/sirr/html/report/report.shtml>

⁵ <http://www.nytimes.com/2012/11/03/opinion/forget-sustainability-its-about-resilience.html?pagewanted=all&r=0>

Pengalaman New York dan New Jersey tahun 2012 ini membuka mata mereka, termasuk dari kalangan akademik dan profesi, tentang perlunya memberikan wawasan baru dan keahlian baru bagi para profesional untuk memahami dan mampu mengerjakan dua sisi keahlian tersebut secara utuh: melakukan rancangan yang ramah lingkungan (sustainable design) sekaligus juga tangguh terhadap tekanan oleh lingkungan (resilience). Ini merupakan hal baru yang juga belum sepenuhnya dikembangkan, dan akan dicobakan dalam program akademik Master of Business and Science with concentration on sustainability⁶ dengan tiga fokus: *urban eco-sustainability, energy technologies, environmental science & policy* – yang kesemuanya diwajibkan untuk mengambil beberapa matakuliah pokok dalam bidang bisnis/manajemen.

BAGAIMANA DI INDONESIA KE DEPAN?

Program pendidikan lintas disiplin dalam bidang “sustainability” mungkin sudah menjadi bagian dalam kurikulum akademik di Indonesia, saya tak terlalu yakin, sebab masing-masing “prodi” masih mengutamakan satu aspek yang diembannya (misal: disain oleh arsitektur, struktur oleh teknik sipil, perencanaan oleh planologi, atau penanganan limbah oleh teknik lingkungan, atau manajemen dsb – dan agak lemah dalam sisi bisnis, atau kebijakan publik). Belum lagi bila “sustainability” ini dikaitkan dengan “resilience” seperti diuraikan di atas, maka hal ini mungkin belum sempat dikembangkan oleh dunia akademik.

Informasi terakhir yang dapat kita lihat dari situs BNPB menyatakan:

Sesuai amanat UU 24/2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa urusan bencana adalah tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Pekerja kemanusiaan dituntut untuk wajib memberikan pelayanan yang baik ke masyarakat terdampak. LSP PB akan menetapkan program pengembangan SDM berbasis kompetensi kerja pada bidang penanggulangan bencana dan pengembangan materi uji kompetensi untuk tiap jenis profesi beserta kualifikasinya. “Pada tahun ini kita telah memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi Penanggulangan Bencana (LSP-PB), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2014 dan menetapkan 18 profesi untuk kebutuhan masa tanggap darurat”, ucap Kepala Biro Hukum dan Kerjasama BNPB dalam laporannya.

(<http://bnpb.go.id/berita/2291/pengukuhan-lsp-pb-indonesia>)

Hal ini merupakan perkembangan yang baik meskipun sangat terlambat (berarti selama ini penanganan kebencanaan oleh personil BNPB dilakukan oleh mereka yang belum teruji kompetensinya?)⁷

⁶ <http://mbs.rutgers.edu/programs/sustainability>

⁷ Sedikit *flashback*, secara pribadi saya terlibat dalam diskusi dengan salah satu staf ahli Menteri PU pada tahun 2006-2007 membahas rencana pendirian BNPB dan saya kemukakan pada waktu itu bahwa sebelum lembaga itu berdiri maka para personil intinya setidaknya telah mendapatkan pelatihan dan diberikan sertifikasi keahlian. Lalu saya hubungi kawan-kawan dari Bandung (Wanadri, ITB, Mahawarman dsb) yang masing-masing memiliki kompetensi dalam bidang yang relevan (SAR Nasional, international sertificate on disaster management dsb) sekitar lima orang yang siap untuk menjadi “faculty” dalam memberikan pelatihan sertifikasi awal bersamaan dengan berdirinya BNPB. Namun perkembangannya berbeda dengan berbagai alasan oleh rejim SBY saat itu yang menunjuk kawan dekatnya menjadi Kepala BNPB hingga sekarang. Malah secara pribadi mereka menghubungi saya meminta untuk menjadi salah satu deputi dan saya tolak karena saya tak memiliki kompetensi di bidang itu. Ironisnya, kemudian saya dihubungi oleh UNDP dan diminta menjadi consultant UNDP dalam memberikan pelatihan dan capacity building bagi personil BNPB yang baru dibentuk, dan itu juga saya tolak.

Apa yang menjadi fokus BNPB mungkin baru dalam aspek penanganan kebencanaannya (*operations management*) – dan mungkin juga pada beberapa aspek yang menyangkut kesiapan menghadapi bencana (*resilience*) secara operasional.

Bila kita ingin melakukan inovasi dalam keprofesian ini maka yang dapat disarankan adalah memulai dengan memadukan keahlian dalam bidang “*sustainability*” dan “*resilience*” sebagai satu kesatuan konsep dan keahlian praktis. Pemahaman dan kemampuan melakukan rancangan fisik, sistem dan jejaring termasuk pengelolaan dan operasionalnya, dengan memahami konteks sosial-budaya dan perilaku maupun rejim peraturan perundang-undangan secara nasional dan internasional.

Dengan posisi Indonesia yang menjadi pimpinan working group bidang ini di Asia dan Pasifik maka keprofesian baru ini mempunyai prospek untuk dijadikan pusat pelatihan dan riset secara regional, dimana Indonesia yang menjadi *champion*.

Sebagai hal yang baru maka tentu diperlukan pengetahuan awal dan referensi secara internasional untuk menunjukkan “*credential*” kita selaku pencetus dan pemimpin di bidang ini, selain tentunya adanya “rumah lembaga” yang layak dan bersifat lintas-profesi/lintas-displin – dimana dalam diskusi ini kita banyangkan akan bernaung di bawah PII bidang Teknik Industri (dalam arti baru yang lebih luas).

Untuk itulah kegunaan memanfaatkan kerjasama dengan Rutgers University guna mendapatkan transfer pengetahuan dan pengalaman (dalam menyusun substansi materi pengetahuan dan keterampilan) untuk kita sesuaikan dengan pengalaman Indonesia yang telah banyak melahirkan “alumni praktisi” penanganan kebencanaan sejak BRR hingga BNPB dan berbagai LSM nasional maupun internasional.

AGENDA KE DEPAN

PII dapat menjadi lembaga tempat bernaungnya bidang keahlian hibrida baru ini, untuk menetapkan kriteria dan memberikan sertifikasi keprofesian. Terlepas dari sudah atau belum adanya program akademik yang sesuai dengan fokus baru ini, secara profesional dapat dipersiapkan program pelatihan yang terstruktur dan sistematis yang mendapatkan pengakuan secara internasional. Mungkin masih diperlukan waktu untuk menyelesaikan birokrasi pendidikan tinggi secara resmi sebelum program hibrida ini dapat diakui dan diberikan tempat dalam program pendidikan bergelar akademik. Untuk itu program profesi yang kita kembangkan dapat menjadi embrio dan menciptakan *demand* baru guna mendorong didirikannya program akademik yang lebih lanjut (pasca sarjana) dan membuat pengetahuan baru.

Lembaga apa yang menjadi “rumah” untuk menyenggarakan pelatihan, memberikan advokasi kebijakaan, dan mengembangkan penelitian serta diseminasi informasi? Kemungkinan yang terpikir oleh saya saat ini – untuk kita diskusikan – adalah dalam bentuk kerjasama (membentuk semacam konsorsium) dari unsur keprofesian “induk”

(PII), keprofesian spesialis (IAI, IAP, IATPI, ISTMI, HAKI, dsb), LSM (ISHSI⁸, LP3I), perguruan tinggi (Tarumanagara, ITB, UGM, ITS dsb), dan lembaga pemerintah (KemenPU-Pera, Balitbang, Pusdiklat Kementerian dsb.)

Dalam kesempatan awal ini, PII sebagai “induk” yang akan memberikan sertifikasi perlu menetapkan kriteria kelayakan lembaga maupun kemampuan teknis yang dimiliki lembaga tersebut untuk dapat diakui sebagai mitra penyelenggara pendidikan pelatihan profesi ini. Inilah kesempatan yang kita ambil.

Perlu diulangi dan digaris-bawahi bahwa prospek lingkup pelayanan sertifikasi profesi baru ini tidak hanya di Indonesia atau ASEAN tetapi juga kawasan Asia Pasifik.

Untuk itu mari kita diskusikan. Tulisan awal ini hanya sebagai pengantar untuk menggugah diskusi lebih lanjut di antara kita dan sangat terbuka untuk saran konstruktif guna menjadikannya layak untuk diimplementasikan.

Terima kasih.

⁸ Dalam waktu dekat akan diresmikan sebuah lembaga bernama “Indonesia Sustainable Human Settlements Institute” yang telah lama digagas dan diprakarsai oleh Suharso Monoarfa (ex Menpera, PL-74 ITB), Budi Yuwono (TP-72 ITB ex Dirjen Cipta Karya, sekarang anggota DPR-RI dari PDIP), Amwazi Idrus (GL-75, masih aktif di PU-Pera) termasuk saya pribadi yang juga diajak, dan masih terbuka untuk didukung beberapa kawan lain yang berminat sesuai dengan bidang yang diperlukan untuk melengkapi paradigm baru yang bersifat lintas-disiplin. Lembaga baru akan difokuskan untuk menjadi mitra pemerintah dalam menindak-lanjuti agenda APMCHUD dan agenda Habitat III 2016-2036, terutama dalam bidang yang Indonesia menjadi pimpinan (yaitu Working Group on *Urban Development for Equal Opportunity Responding to Natural and Climate Change related Disasters*).